

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS.....	v
HALAMAN CURICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7

D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Teori Negara Hukum.....	8
2. Teori Pembagian Kekuasaan.....	11
3. Teori embaga Negara.....	14
F. Defenisi Operasional.....	17
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN,
STATE AUXILIARY ORGANS DAN KOMISI YUDISIAL**

A. Kekuasaan Kehakiman.....	24
1. Arti Kekuasaan Kehakiman.....	24
2. Tugas dan Peranan Peradilan.....	28
3. Pengawasan Terhadap Hakim.....	30
B. <i>State Auxiliary Organs</i>	35
1. Penggunaan Istilah.....	35
2. Latar Belakang Pembentukan <i>State Auxiliary Organ</i> di Indonesia...39	

3. Kedudukan <i>State Auxiliary Organ</i>	41
C. Komisi Yudisial.....	43
1. Pengertian Komisi Yudisial.....	43
2. Sejarah Terbentuknya Komisi Yudisial di Indonesia.....	44
3. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial.....	46
4. Kedudukan Komisi Yudisial.....	47
 BAB III ANALISIS YURIDIS TENTANG URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG TERHADAP UPAYA MENJAGA KEHORMATAN KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU HAKIM MENURUT PERATURAN KOMISI YUDISIAL NO. 01 TAHUN 2012.	
A. Urgensi pembentukan Komisi Yudisial Penghubung dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran, Martabat serta Perilaku Hakim.....	50
B. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Penghubung di Daerah.....	65
C. Kelebihan dan Kekurangan Peranan Komisi Yudisial Penghubung dalam Upaya Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....84

B. Saran.....86

DAFTAR PUSTAKA.....87



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penyelesaian Hukum Kasus-kasus HAM Kasus Tanjung Priok.....	53
Tabel 3.2 Kasus Timor Timur.....	54
Tabel 3.3 Penangan Kasus Korupsi.....	55

